

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga bisa disimpulkan sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik yang memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah dibentuk pada umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan yang meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang (Darling, 2013). Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tersebut berupa pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakkan hukum, transportasi publik, insfrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tentang pelaksanaan otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999), maka terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah memperjelas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, dan untuk melihat berapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan yaitu dengan menganalisis laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran adalah menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban

pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Al Fino Losa, 2012).

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dinilai dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Ada 5 rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan (Ramli, 2016).

Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi, dan efektivitas, dalam merealisasikan pendapatan daerah, sejauh mana keserasian pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta pertumbuhan atau perkemabangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Abdul Halim dan Kusufi, 2012).

Penggunaan pada analisis rasio keuangan dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah belum banyak dilakukan, tidak seperti sektor privat yang lebih sering dilakukan, hal itu dikarenakan keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan organisasi yang bersifat privat, dan penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD (Joko Pramono, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat penulisan ilmiah yang berjudul **“ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014-2017.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
3. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Keserasian?
5. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan di Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Kinerja keuangan di Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
3. Kinerja keuangan di Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
4. Kinerja keuangan di Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Keserasian.
5. Kinerja keuangan di Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari Rasio Perumbuhan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran pemerintah daerah dalam menganalisis kinerja keuangan yang berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan mengetahui pengaruh penerapan teori rasio

kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasiaan, dan rasio pertumbuhan, untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian Pemerintah Jawa Barat.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya tentang kinerja keuangan pemerintah.